

Judul : Pemerintah Kejar Target Kesejahteraan
Tanggal : Rabu, 30 September 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 9

Pemerintah Kejar Target Kesejahteraan

Pemerintah menargetkan peningkatan proporsi lapangan kerja formal menjadi 10,81 persen. Tingkat kemiskinan antara 6 persen dan 6,5 persen.



Menteri Keuangan Suahasil Nazara (kiri) menerima lembar Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja APBN 2027 yang telah disetujui DPR untuk disahkan menjadi undang-undang dari Ketua DPR Puan Maharani (tengah) dan Wakil Ketua DPR Purnomo Djojo Hadisoedarmo (kanan) di Jakarta, Selasa (29/9/2026).

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi sebesar 5,25 persen, tapi juga target pengurangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran. Salah satunya, proporsi lapangan kerja formal menjadi 10,81 persen.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan, pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi menjadi salah satu faktor pendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi faktor pendorong percepatan pengurangan kemiskinan masyarakat yang dituangkan di dalam beberapa target pembangunan, kata Suahasil dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II Pengambilan Keputusan atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2027 di ruang sidang Paripurna DPR, Jakarta, Selasa (29/9/2026).

Dalam APBN 2027, pemerintah dan DPR telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi 5,25 persen, target pengurangan kemiskinan antara 6 persen dan 6,5 persen, dan target pengurangan pengangguran sebesar 4,25-4,87 persen. Indeks modal manusia ditargetkan meningkat menjadi 6,77.

Sementara itu, proporsi lapangan kerja formal ditargetkan menjadi 10,81 persen. Pengurangan lapangan kerja informal ditargetkan 2,57 juta-3,49 juta.

Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah mengatakan, pemerintah perlu diikuti dengan pengurangan atau memangkas program yang dibayai APBN. Program pemerintah tidak cukup hanya dibelanjakan, tetapi juga perlu dipastikan memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat sebagai penerima manfaat.

"Agar cita-cita kesejahteraan hadir nyata, setiap program pemerintah yang dibayai oleh RUU APBN harus diarahkan dampak nyatanya oleh rakyat. Demikian pula program yang dibayai harus bisa diukur," kata Said dalam konferensi pers setelah rapat paripurna.

Menurut dia, pengurangan tersebut dapat dilakukan ber-

dasarkan bukti sekaligus melalui tingkat kepuasan masyarakat sebagai penerima manfaat. Dengan demikian, pemerintah sebagai negara perlu diikutsertakan dalam program untuk memastikan efektivitas program yang dijalankan.

Said juga menekankan bahwa perlu ditambah dengan peningkatan pendapatan negara. Dibandingkan dengan tahun lalu, pada APBN 2027, pendapatan dan belanja negara masing-masing meningkat Rp 9,1 triliun, sementara target defisit tetap 2,4 persen dari produk domestik bruto.

Tambahan belanja untuk menopang program prioritas nasional, lanjut Said, harus diikuti peningkatan pendapatan dari perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak. Dengan demikian, kenaikan belanja tidak semata-mata dibebankan pada pembiayaan.

Lapangan kerja formal

Pendorong terhadap penciptaan pekerjaan menjadi bagian penting dari upaya pemerintah meningkatkan pertumbuhan ekonomi ke dalam manfaat yang lebih nyata. Dalam konferensi pers setelah rapat paripurna, Suahasil kembali menekankan perlunya meningkatkan proporsi lapangan kerja yang semakin formal dan berkualitas.

Selain memperkuat penciptaan tenaga kerja, pemerintah juga mengoptimalkan peningkatan ekspor sebagai bagian dari strategi pertumbuhan. Suahasil mengatakan, kondisi perekonomian domestik yang tetap tumbuh menjadi modal untuk menciptakan lapangan kerja secara inklusif menyerap ekspor ke pasar dunia.

Ekonomi Indonesia tumbuh 5,45 persen pada semester I-2026. Menurut Suahasil, pertumbuhan tersebut menunjukkan aktivitas ekonomi tetap berjalan, sementara inflasi masih terkendali dan penerimaan pajak menunjukkan pertumbuhan.

"Ini semua adalah modal kita untuk terus menciptakan lapangan kerja baru, baik melalui ekspor ke pasar dunia," katanya.

Untuk mendukung sasaran tersebut, APBN 2027 dirancang ekspansi dengan tetap menjaga

prinsip kehati-hatian. Pendapat negara ditargetkan Rp 3.000 triliun dan belanja Rp 3.000 triliun dengan defisit ditargetkan 2,4 persen terhadap produk domestik bruto.

Belanja negara juga diarahkan pada sejumlah program yang berkaitan langsung dengan peningkatan kesejahteraan. Anggaran pendidikan dialokasikan Rp 824 triliun, perlindungan sosial Rp 597 triliun, ketahanan pangan Rp 195,2 triliun, dan transfer ke daerah Rp 755 triliun.

Menurut Suahasil, anggaran pendidikan tidak hanya dimaksudkan untuk memenuhi amanat konstitusi, tetapi juga menjadi investasi bagi kualitas sumber daya manusia.

Program yang dibayai, antara lain, Program Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Pintar KIP, Kuliah, renovasi sekolah dan madrasah, pengembangan Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Cendekia, serta beasiswa dan pengembangan talenta melalui Lembaga Pendidikan Dana Pendidikan (LPDP).

Sementara itu, anggaran perlindungan sosial diarahkan untuk mendukung masyarakat berpenghasilan rendah, miskin, dan rentan sebagai penerima manfaat pengangguran kemiskinan.

Suahasil menjelaskan, pemerintah juga akan bekerja sama dengan Kementerian dan lembaga lain serta Bank Dunia untuk membuka ruang investasi, menciptakan produk dan jasa, serta memperkuat pengurangan tenaga kerja melalui dana investasi negara.

"Pemerintah telah mulai bekerja untuk secara spesifik membuat ruang-ruang investasi untuk penyerapan tenaga kerja melalui dana investasi negara untuk menciptakan ekonomi Indonesia yang terus tumbuh," katanya.

Di bawah proyeksi

Target pertumbuhan ekonomi pemerintah pada 2027 berada di atas proyeksi sejumlah lembaga internasional. Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB), dalam Asian Development Outlook September 2026, memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh 5,2 persen pada 2027.

Sementara itu, Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD), dalam Economic Outlook Interim Report September 2026, memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2027 sebesar 5,1 persen.

Kedua proyeksi tersebut tertib pada pertengahan pekan ini dan berada di bawah target pemerintah sebesar 6 persen.

Bank ADB maupun OECD mengidentifikasi sejumlah risiko yang dapat memengaruhi prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia. Risiko tersebut, antara lain, ketahanan geopolitik di Timur Tengah yang dapat mendorong kenaikan harga minyak dan inflasi serta memengaruhi perdagangan global.

Ekonomi Center of Reform on Economics (COREC) Indonesia, Yusuf Bende Mambel, mengatakan, pengurangan konsumsi rumah tangga membatalkan peningkatan pendapatan riil dan pengurangan lapangan kerja formal. Menurut dia, stimulus jangka pendek yang tidak cukup untuk mengupayakan konsumsi.

Di sisi konsumsi, yang dibutuhkan bukan sekadar stimulus jangka pendek, melainkan juga peningkatan pendapatan riil dan pengurangan lapangan kerja formal," katanya.

Yusuf juga menilai peningkatan kapasitas ekonomi perlu berjalan seiring dengan pengurangan sumber-sumber pertumbuhan lainnya agar pertumbuhan ekonomi dapat meningkat.

Dengan demikian, peningkatan daya beli perlu ditopang oleh perbaikan fundamental ekonomi agar pertumbuhan tidak hanya bersifat sementara.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pemantau Bank Dunia Parag Mehta mengatakan, target pertumbuhan 6 persen membutuhkan pengurangan sejumlah sumber pertumbuhan secara bersamaan. Menurut dia, pertumbuhan tidak cukup hanya ditopang oleh belanja pemerintah atau proyek infrastruktur berskala besar.

Dengan kata lain, 6 persen lebih tepat dipandang sebagai skenario pertumbuhan yang memerlukan kebijakan, bukan pertumbuhan yang akan terjadi secara otomatis," katanya. (DPR)